

**PESAN-PESAN DAKWAH KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DALAM  
ESKALASI POLITIK PILGUB JAWA TIMUR 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Guna  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**



**Oleh:**

**Dimas Mahendra Riski Putra Ariansyah  
NIM. B71214035**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**JURUSAN KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Mahendra Riski Putra Ariansyah

NIM : B71214035

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : Jl. Bulak Jaya gang 4/73 Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 6 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Dimas Mahendra Riski PA

B71214035

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

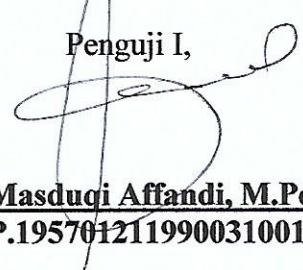
Skripsi yang disusun oleh Dimas Mahendra Riski ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi.  
Surabaya, 6 Februari 2019

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,  
  
Dr. H. Abd. Halim, M.Ag  
NIP.196307251991031003

TIM PENGUJI

Penguji I,

  
Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I  
NIP.195701211990031001

Penguji II,

  
H. Fahrur Razi, S.Ag, M.HI  
NIP.196906122006041018

Penguji III,

  
Dr. Abd. Syakur, M.Ag  
NIP.196607042003021001

Penguji IV

  
Rozaqul Arif, M.Sos.I  
NIP: 198210122015031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Dimas Mahendra Riski Putra Ariansyah  
Nim : B71214035  
Jurusan :KomunikasidanPenyiaran Islam  
Judul :Pesan-Pesan Dakwah Khofifah Indar Parawansa Dalam Eskalasi  
Politik Pilgub Jawa Timur 2018

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk  
diujikan.

Surabaya, 6 Februari 2019

Dosen Pembimbing



**Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I**  
**NIP.195701211990031001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Mahendra Riski Putra Ariansyah.  
NIM : B71214035  
Fakultas/Jurusan : Da'wah dan Komunikasi / Komunikasi dan Penyiaran Islam.  
E-mail address : dimasmahendra169@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pesan - Pesan Dalawah Khotifah Inkar Parawansa dalam Eskalasi Politik  
Pilgub Jawa Timur 2018.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Dimas Mahendra )  
nama terang dan tanda tangan













tumbuh berkembang dan dibesarkan dalam tradisi dan pemikiran organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Saat menghadiri harlah NU yang ke 91, khofifah berpesan kepada seluruh anggota kader NU untuk menjadikan NU ini sebagai mobil plat hitam. Bukan plat kuning yang bisa disewa dan ditumpangi oleh siapa saja atau bahkan plat merah yang hanya dimiliki oleh para pejabat atau petinggi birokrasi. Karena menurutnya, perkembangan bangsa ini tak lepas dari perjuangan dan kiprah para kyai-kyai pembesar NU. Jadi warga NU harus menjadi warga Indonesia yang bermanfaat bagi agama, lingkungan sekitar dan bangsa ini. Dia berikhtiar untuk berjuang dan melayani masyarakat membangun bangsa ini melalui metode dan pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang diajarkan para pembesar tokoh NU yang juga tokoh bangsa seperti Gus Dur.<sup>4</sup>

Sedikit berbeda dengan Khofifah, Gus Ipul, saat masih mahasiswa memilih HMI untuk menjadi wadahnya berproses. Pada tahun 1990-1992 dia terpilih untuk menjadi ketua umum HMI cabang Jakarta.<sup>5</sup> Dari HMI, dia menjadi ketua umum IPNU pada tahun 1992-1994, dan di ketua umum GP Anshor mulai dari tahun 1999-2010.<sup>6</sup>

Selama menjadi ketua GP Anshor, Gus Ipul selalu berpesan untuk kader Anshor harus selalu mengembangkan kemampuan berdakwah. Anshor harus bisa

---

<sup>4</sup> Andi Mardan (2017): *Mensos Khofifah Bangga Lahir Dan Berkembang di NU*, <http://majalahkartini.co.id/berita/serba-serbi/mensos-khofifah-bangga-lahir-dan-berkembang-di-nu/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 19:30

<sup>5</sup> Ac/Dn (2016): *Profil Syaifullah Yusuf*, <https://www.viva.co.id/siapa/read/587-saifullah-yusuf> diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 20:00

<sup>6</sup> Muhammad Nurdi Fathurohman (2017), *Biografi Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa timur ke-4*, <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2017/10/biografi-saifullah-yusuf-gus-ipul-wakil-gubernur-jawa-timur-ke-4.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 20:22







yang akan mengurangi kekhidmatan pesta demokrasi daerah, yakni anggaran yang tidak sedikit, kemungkinan mark-up biaya Pilkada, persiapan yang kurang memadai, pengalaman memilih pemimpin yang belum mapan, stabilitas keamanan yang masih rapuh, dan kesiapan menerima hasil Pilkada yang belum matang.

Praktik pemilihan umum (Pemilu) seringkali diwarnai dengan berbagai macam dinamika serta konflik. Seperti penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta, pergolakan terjadi dan memberikan dampak pada Pilkada di daerah lainnya. Berawal dari statement Gubernur Incumbent Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang dianggap melecehkan umat Islam dan kasus tersebut kemudian menjadi isu nasional. Fenomena Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi pembelajaran bagi praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama terkait dinamika serta konflik pelaksanaan pesta demokrasi yang sarat kepentingan dan sensitif. Pelajaran berharga dari Pilkada DKI Jakarta 2017 juga terkait dengan penggunaan isu SARA, keberpihakan institusi terhadap calon, perang program, pencitraan kandidat, dan juga tindakan yang saling jegal hingga praktik politik uang. Namun, semua cara tersebut sebenarnya merupakan realitas sering digunakan sebagai strategi untuk kemenangan calon di hampir semua daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk memilih Gubernur pada tahun 2018. Daerah ini memiliki akar sejarah yang kuat terutama terkait budaya dan jumlah massa fanatik. Pergolakan itu sudah mulai terlihat dan terekam dalam beberapa kegiatan yang melekat pada lembaga ataupun perseorangan. Fenomena yang muncul ke permukaan memang

belum terlihat jelas, namun demikian isu-isu politik mulai meramaikan berbagai kegiatan di Jawa Timur.

Agenda Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tahun 2018 disertai berbagai agenda politik, mulai dari bentuk promosi dan juga pencitraan beberapa figur yang digadang akan maju. Jauh sebelum penentuan calon, sudah banyak yang memperlihatkan eksistensinya, sehingga dinamika politik mulai kentara ke permukaan. Dalam bursa calon Gubernur (Cagub) dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur terdapat beberapa kandidat yang dianggap mempunyai kapabilitas dan peluang untuk diusung seperti Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, Azwar Anas, Agus Harimurti, Said Abdullah, Halim Iskandar, M. Misbakhun, Hasan Aminuddin, Rendra Kresna.

Bursa Cagub dan Cawagub di atas menampilkan 10 kandidat yang memiliki kualifikasi dan berbagai pertimbangan. Tetapi, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi mengingat peta politik di Jawa Timur sulit diprediksi. Akan tetapi disini penulis melihat realitas yang paling rasional. Berdasarkan nama-nama diatas, yang paling berpeluang sukses untuk maju yakni Syaifullah Yusuf yang merupakan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawangsa yang pada waktu itu menjabat Menteri Sosial RI. Jika di telisik lebih dalam, dua kandidat tersebut memilikirekam jejak kompetisi panjang saat Pilgubduaperiode sebelumnya. Selain itu, kedua kandidat merupakan mantan pengurus Gerakan Pemuda Anshor dan juga Muslimat, dimana kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang



berdiri dibawah naungan NU. Sedangkan NU sendiri memiliki basis masa yang besar di Jawa Timur.

Selain kedua paslon tersebut, ada juga yang akan memajukan diri dengan beberapa partai pengusung yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Ketiga partai tersebut awalnya akan memajukan diri dengan mengusung sebuah nama yakni La Nyalla Matalitti. Sayangnya, surat mandat Gerindra dengan terpaksa dikembalikan La Nyalla karena hingga batas waktu dia tidak bisa melobi partai lain untuk mengenakan kursi dukungan. Padahal La Nyalla berpotensi menjadi kuda hitam andai dia menjadi bakal calon gubernur ketiga. Boleh jadi La Nyalla punya rekam jejak tidak mengenakan, khususnya dikalangan penggemar sepakbola. Tapi dia punya massa akar rumput yang kuat melalui ormas Pemuda Pancasila. Kekuatan La Nyalla hanya bisa diimbangi Khofifah yang sama-sama punya massa melalui organisasi sayap ibu-ibu NU, Fatayat. Tanyalah ke semua ibu-ibu NU anggota Fatayat dari kota hingga pelosok desa, pasti kenal dengan nama ketua umum mereka.

Khofifah Indar Parawansa, aktivis perempuan Nahdlatul Ulama (NU) ini terbilang konsisten. Terjun ke dunia politik mengantarkan dirinya sebagai anggota dewan hingga menjadi menteri dua kali dengan presiden yang berbeda. Khofifah Indar Parawansa dikenal dengan panggilan khofifah. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 ini menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Bahkan masa sekolah dan kuliahnya juga di kota Pahlawan ini.

Saat kuliah, ia mengambil dua jurusan yang berbeda di perguruan tinggi yang berlainan. Pertama, dia belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair) dan kedua, ia belajar ilmu komunikasi dan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya. Karier politiknya dimulai saat dia berusia 27 tahun menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1992-1997. Pada pemilu berikutnya, 1997, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada periode ini, Khofifah hanya bertahan dua tahun. Karena pada waktu itu, tahun 1998, terjadi peralihan rezim Orde Baru ke Era Reformasi. Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, pemilu pertama di Era Reformasi. Kali ini, Khofifah berpindah partai ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang lahir di Era Reformasi bentukan Abdurrahman Wahid. Khofifah terpilih kembali sebagai anggota dewan, tetapi dia tidak lama bertugas di sana. Pada tahun 1999, dia diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden terpilih Abdurrahman Wahid pada kabinet Persatuan Indonesia.

Nasib Khofifah menjadi menteri juga tidak bertahan lama, hanya dua tahun, seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999-2001. Presiden baru Megawati tidak memasukkan Khofifah sebagai menternya dalam Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Berhenti jadi menteri, tidak membuat dirinya kecil hati. Dia semakin aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dia aktif di organisasi Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Dia memimpin Muslimat periode 2000-2005. Dalam beberapa kunjungannya sebagai seorang ketua umum muslimat. Dia selalu berpesan untuk semua anggota muslimat agar menjadi perempuan pemersatu





Saifullah Yusuf terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota DPR, menteri, hingga Wakil Gubernur Jawa Timur. Putra dari pasangan Ahmad Yusuf Cholil dan Sholichah Hasbullo pada awalnya bercita-cita ingin jadi guru madrasah. Keinginan ini berawal dari keadaan madrasah yang menyedihkan di tempatnya. Ditambah lagi, sang ayah merupakan guru agama SD dan SMP sekaligus pegawai Departemen Agama saat itu.

Untuk mengejar cita-cita mulianya, Gus Ipul menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang dan SMP Islam Pasuruan. Dirinya pun tidak memilih dalam berteman. Sahabatnya datang dari berbagai kalangan. Setelah lulus dari SMA, Pamannya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menganjurkan Gus Ipul untuk berkuliah di Jakarta. Ia pun memilih masuk jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional. Selain itu, Gus Ipul memperdalam ilmu dari Gus Dur yang pada masa itu tengah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Inilah yang menjadi langkah awalnya di dunia politik.

Gus Ipul mengawali karier politiknya dengan bergabung GP Ansor, organisasi sayap pemuda NU. Di tahun 1999, Gus Ipul dipercaya untuk menggantikan posisi Ketua Umum karena pimpinan kala itu, Iqbal Assegaf wafat. Selang setahun, Gus Ipul kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum GP Ansor. Pada awalnya, Saifullah Yusuf terpilih sebagai anggota DPR Fraksi PDI-P. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Namun, saat hubungan Gus Dur dan Megawati merenggang, Gus Ipul memutuskan untuk keluar dari DPR dan PDI-P dan pindah ke PKB (Partai

Kebangkitan Bangsa) pada tahun 2001 lalu. Saat muktamar PKB tahun 2002, Gus Ipul terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB mengalahkan kandidat-kandidat kuat lainnya. Selang 2 tahun, Suami dari Fatma Saifullah Yusuf ini mendapat amanah baru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia selama 1 periode.

Namun sayangnya, konflik internal yang terjadi dalam tubuh PKB justru berujung pada pencopotan jabatan Gus Ipul sebagai Sekjen PKB. Hal itu juga berimbas pada jabatan Menteri yang tengah ia emban. Posisi Sekjen PKB tersebut akhirnya digantikan oleh Lukman Edy. Namun di sisi lain, Gus Ipul tetap sebagai petahana Ketua Umum GP Ansor untuk periode 2005-2010. Saat usianya 44 tahun, Gus Ipul mendampingi Soekarwo maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Setelah melewati 2 kali putaran serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Sampang pada 21 Januari 2009, akhirnya terpilihlah Soekarwo dengan wakil Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Setelah memimpin bersama selama satu periode 2008-2013, pasangan ini kembali terpilih pada Pilgub 2013 untuk periode 2014-2019. Pada tahun 2017, Gus Ipul maju sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub 2018 mewakili PKB. Pada Pilgub kali ini, PDI Perjuangan juga memberikan rekomendasi Saifullah Yusuf sekaligus berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Namun, di tengah perjalanan, Azwar Anas mengundurkan diri dengan mengembalikan mandatnya ke PDI Perjuangan. Nama Puti Guntur Soekarno, anggota DPR sekaligus cucu Presiden Soekarno, dipilih PDIP Perjuangan menjadi pendamping

Gus Ipul. Dengan kekuatan baru ini, langkah politik Gus Ipul tampaknya belum berakhir. Selangkah lagi, bila menang, ia menjadi orang nomor satu Jawa Timur.<sup>18</sup>

Saat kunjungannya di Lumajang. Gus Ipul sempat juga menyampaikan pesan pada pedagang pasar disana. Beliau memohon doa agar nanti ketika dia mengabdikan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur tersebut disertai dengan taufik Allah.<sup>19</sup>

Sinyal majunya kedua kandidat dengan polling teratas yang di release oleh media memberikan penegasan bahwa kedua calon inilah yang paling kuat basis pendukungnya untuk bersaing merebutkan kursi gubernur. Kedua kandidat tersebut dalam Pilkada sebelumnya juga bertarung dengan sengit. Melihat fenomena tersebut, pemetaan terhadap peluang untuk memenangkan kursi kepala daerah Jawa Timur menarik dilakukan, sehingga terbentuk inventarisasi peta kekuatan politik dari kedua calon. Upaya ini juga diarahkan sebagai referensi terhadap tim pemenang, supaya dapat membuat strategi kemenangan, dari hasil analisis yang menjadi kekuatan dan juga peluang serta kelemahan. Hal ini tentunya terkait erat dengan budaya masyarakat, koalisi partai pendukung calon, hasil Pilkada yang telah lalu, dan juga daerah persebaran suara yang ada di Jawa Timur. Disini kemudian akan ada gambaran secara detail dan jelas, terkait peluang kemenangan Pilkada Jawa Timur 2018.

---

<sup>18</sup> Ac/Dn (2016): Syaifullah Yusuf, <https://www.viva.co.id/siapa/read/587-saifullah-yusuf> diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 12.20 wib.

<sup>19</sup> Zaenal Efendi (2018): *Ini Gaya Gus Ipul Saat Blusukan ke Lumajang*, <https://www.detik.com/berita-jawa-timur/d-3916071/ini-gaya-gus-ipul-saat-blusukan-ke-lumajang> diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 13:30

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur akhirnya hanya diikuti dua pasangan calon saja. Koalisi tiga partai, Gerindra-PKS-PAN yang semula berharap bisa mengusung calon sendiri akhirnya bubar karena ketidaksamaan visi. Gerindra dan PKS berbalik mendukung bakal calon gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung PKB dan PDIP, sementara PAN memutuskan untuk merapat pada bacagub Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya sudah diusung Demokrat, Golkar, Nasdem dan Hanura.

Melihat kultur masyarakat Jawa Timur yang mayoritas NU, langkah Gerindra-PKS-PAN yang rela tidak mengusung calon sendiri terlihat wajar. Dua bakal calon gubernur yang sudah diusung partai lain murni berdarah biru NU. Sangat berat rasanya jika ada partai yang mengusung bakal calon yang tidak punya rekam jejak ke-NU-an. Namun, bukan tidak mungkin. Karena untuk memenangkan sebuah pilkada hanya berkuat pada dua faktor saja, nama besar dan massa.

Dengan berbagai gejolak yang tersajikan diatas, pergerakan politik yang masif dari masing-masing calon gubernur berlatar belakang kader NU tersebut menjadi ketertarikan sendiri untuk sebuah penelitian. Peneliti akan mengangkat pesan dakwah salah satu strategi politik dari calon gubernur 2018 yakni khofifah indar parawansa yang telah tiga kali mencalonkan sebagai gubernur dan baru sukses di tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Pesan-Pesan Dakwah Khofifah Indar Parawansa Dalam Eskalasi Politik Pilgub Jawa Timur 2018”.



















































yang bersifat kata-kata (lisan) yang berupa ceramah, pidato dan penyampaian pesan-pesan keagamaan secara lisan. Sedangkan yang kedua lebih menekankan pada upaya kegiatan yang berbentuk aksi dan tindakan nyata berupa kegiatan kerja, amal-amal sosial kemasyarakatan dan pelaksanaan program kerja. Dalam kenyataannya di lapangan, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal dapat direalisasikan secara serentak dan simultan. Perpaduan dari dua bentuk dakwah seperti ini tentunya akan lebih efektif karena kedua pola dakwah tersebut sama-sama relevan dan urgen, dan sangat diperlukan dalam menggalang kerja sama dan menyukseskan program-program dakwah.

Dakwah, baik dalam tataran identitas maupun pada tataran realitas, memiliki sosok yang multidimensional. Ia bisa diartikan sebagai ajakan untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan, dan larangan atau pencegahan untuk melakukan keburukan dan kemungkar. Ia juga bisa diartikan sebagai suatu gerakan untuk mengubah situasi yang buruk dan tidak baik menjadi situasi yang baik. Ia pun bisa diartikan sebagai hijrah dari situasi yang jelek, buruk, kacau, tidak adil, tidak makmur dan destruktif menuju situasi yang baik, bagus, aman-tentram, adil, makmur dan konstruktif.

Semua ini memerlukan ide, gagasan, aktifitas, gerakan, upaya dan perjuangan yang tidak selalu mudah. Karena kegiatan-kegiatan dakwah yang ditujukan untuk mewujudkan kerja-kerja kebaikan, karya-karya kemanusiaan dan amal-amal kebajikan menuntut ketulusan, kearifan dan kebijakan yang tinggi dalam pelaksanaannya di lapangan.

































Dalam islam sendiri memandang politik berada pada kedudukan mana di syariat islam ini memiliki beberapa pandangan menurut ulama. Pandangan terhadap kedudukan tersebut meliputi:

- a. Yang pertama ialah kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap didalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siyasah (system ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagian integral dari ajaran islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah system yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh para khalifa al-rasyidin yaitu sistem khilafah.
- b. Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.
- c. Ketiga menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran ini berpendirian































Dalam pidato tersebut, Khofifah yang sewaktu itu sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Jatim 2018 memaparkan serangkaian visi misinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Masyarakat Jawa Timur saat itu membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengerti kondisi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Ada sembilan hal yang dipaparkan dalam pidato nawa bhakti satya oleh khofifah, diantaranya ialah:

1. Jatim Sejahtera: Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial.
2. Jatim Kerja: Memberikan Job Training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu usahawan muda mempromosikan, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.
3. Jatim Cerdas dan Sehat: pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat kurang mampu.
4. Jatim Akses: membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir desa terluar.
5. Jatim Berkah: Memberikan tunjangan kehormatan bagi imam masjid masjid di kampung, pesisir, pulau terluar. Perluasan tunjangan kehormatan bagi hafodz-hafidzoh. Penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S2.
6. Jatim Agro: memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.

7. Jatim Berdaya: memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintah desa.
8. Jatim Amanah: menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi. Membudayakan meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga clean goverment, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT.
9. Jatim Harmoni: Khofifah-Emil siap menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Pemaparan Nawa Bhakti Satya tersebut oleh Khofifah merupakan pesannya jika dia terpilih dalam momen kontestasi pilgub Jatim 2018. Dalam pesannya tersebut terdapat pesan dakwah yang terselip, yang akan dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif deduktif induktif.



berikutnya yang dilangsungkan tahun 1997, Khofifah terpilih lagi menjadi anggota DPR.

Jabatannya sebagai anggota DPR periode tersebut hanya bertahan dua tahun karena terjadi peralihan rezim Orde Baru ke Era Reformasi tahun 1998. Setahun berikutnya, pemilu di adakan kembali dan Kholifah terpilih lagi menjadi anggota dewan. Beberapa waktu kemudian, ia dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun yang sama.

Pasca lengsernya Soeharto dan Orde Baru, Khofifah memutuskan untuk berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan peta politik dan penernaan Nadlatul Ulama (NU) yang mengantarkannya ke panggung politik tanah air.

Pada 1998-2000, ia kembali duduk di DPR sebagai wakil dari PKB. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Khofifah diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk pertama kalinya istilah pemberdayaan perempuan digunakan di departemen yang sebelumnya bernama departemen peranan wanita. Khofifah mengatakan bahwa kata “perempuan” dan “wanita” memiliki makna yang berbeda. Wanita berarti “wani ditata” atau siap diatur. Sementara perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti dihormati.

Nasib Khofifah menjadi menteri juga tidak bertahan lama, hanya dua tahun, seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999-2001. Presiden baru Megawati tidak memasukkan Khofifah sebagai

menterinya dalam Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Berhenti jadi menteri, tidak membuat dirinya kecil hati. Dia semakin aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dia aktif di organisasi Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Dia memimpin Muslimat periode 2000-2005. Dalam beberapa kunjungannya sebagai seorang ketua umum muslimat. Dia selalu berpesan untuk semua anggota muslimat agar menjadi perempuan pemersatu bangsa. Karena menurutnya, letak dari besarnya bangsa ini tidak lepas dari peran seorang perempuan.

Setelah tidak lagi menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu kesempatan yang datang padanya untuk menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU dimanfaatkan Khofifah semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi.

Khofifah memberikan perhatian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi jumlahnya di Indonesia. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100.000 per kelahiran hidup kala itu. Dalam kasus ini, Khofifah memilih untuk berjuang dengan masuk ke dalam sistem politik.

Khofifah dipercaya memimpin Muslimat NU selama dua periode. Meski nyaris setiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, mantan Kepala BKKBN itu cukup pandai mengatur waktu. Hal ini berdampak positif pada organisasi yang dipimpinnya itu. Kongres Muslimat NU 2006 di Batam menjadi ujian berat bagi Khofifah. Dia harus bersaing ketat dengan Lily



Wahid, adik kandung Gus Dur, untuk menduduki jabatan ketua umum Muslimat. Namun, karena prestasinya, anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur itu terpilih sebagai ketua umum untuk kedua kali.

Khofifah juga sudah dua kali periode (periode 2008-2013 dan periode 2013-2018) mengikuti pencalonan Gubernur di Jawa Timur. Namun dia disengketakan di Jawa Timur, karena dua kali berturut-turut sengketa terjadi antara dua kandidat yang sama yaitu pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf dengan Khofifah Indar Parawansa (pasangan Khofifah Indar Parawansa pada 2008 yaitu Mudjiono sedangkan pada 2013 berpasangan dengan Herman Suryadi Sumawiredja).

Pada tahapan verifikasi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur terdapat dukungan ganda yang diberikan terhadap pasangan Khofifah-Hermandan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, yaitu dari Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Terhadap dukungan ganda tersebut melahirkan pendapat berbeda dari komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Ketua KPU Andry Dewanto Ahmad dan anggota KPU Sayekti Suindyah menilai dukungan dari PK dan PPNUI kepada Khofifah sah, karena ditandatangani oleh pengurus partai terbaru. Sementara dukungan terhadap pasangan Karsa ditandatangani oleh pengurus partai lama dan ada indikasi













pemerintahan yang baik pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membelanjakan harta negaranya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, kemaslahatan dari rakyat yg dipimpinnya.

Hari ini kalau ibu-ibu yang sebagian besar hadir disini perempuan-perempuan yang meladani muslimat NU kita menyampaikan, hari ini saya melihat banyak kepala keluarga perempuan yang hidupnya terpaksa kemudian terjerat oleh rentenir dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka pengalaman saya selama menjadi menteri sosial saya tadi sudah update berkali-kali dari Oktober sebetulnya saya mencari data terakhir perempuan kepala keluarga yang kurang mampu di Jawa timur.

Mohon kami bisa dibantu menyisir, kami ingin menyapa mereka dengan sapaan kesejahteraan bagi ibu-ibu kepala keluarga yang kurang mampu. Inilah yang sebetulnya sapaan kepada janda-janda miskin mereka harus disapa supaya bisa senyum bahagia, mereka harus disapa agar hidup sejahtera. Mereka harus disapa saat bangun tidur agar tidak takut karena di depan rumahnya mereka tidak ditunggu oleh penagih hutang. Ini adalah cara kita untuk memberikan kemuliaan terutama bagi kepala keluarga perempuan yang kurang mampu.

Kita ingin jga memberikan sapaan kesejahteraan kebahagiaan kemakmuran terutama kepada bakti cerdas dan sehat. Bakti cerdas dan sehat kita ingin menyisir pengalaman saya saat ditugaskan oleh gus dur 2 tahun mundar-mandir ke Malaysia. Saya mengingat bahwa gus dur pada tahun 2004 betul-betul ingin kembali mencalonkan diri sebagai presiden. 2 tahun saya diminta untuk belajar bagaimana pendidikan di Malaysia. Sehingga anak-anak nelayan, anak-anak petani melayu yg ada di Malaysia bisa sekolah, sampai mereka bisa kuliah di seluruh penjuru dunia karena disiapkan beasiswa oleh pemerintah Malaysia.

Yang saya ingin sampaikan adalah kalau mereka adalah anak-anak nelayan, kalau mereka adalah anak-anak petani, kalau mereka adalah anak-anak buruh panggul, dan mereka adalah anak-anak yatim piatu dari keluarga yang tidak mampu. Kita masih punya aps (angka partisipasi sekolah) 7,23. Angka partisipasi sekolah di Jawa Timur ini 7,23 artinya masih banyak anak-anak yang drop out dari kelas 2 smp. Kami ingin mensejahterakan mereka yang tidak mampu untuk bersekolah, agar bisa bersekolah.

Ini mimpi saya dari tahun 2008 dan mungkin teman-teman jurnalis punya rekaman saya di tahun 2008. Mimpi saya, saya sampaikan kembali di tahun 2013, dan mimpi itu sampai sekarang masih sangat kuat. Saya ingin anak petani itu mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan lingkungan yang baik. Anak nelayan juga begitu, anak yatim dan yatim piatu juga begitu, anak-anak buruh panggul pun juga begitu. Oleh karena itu mereka kita siapkan melalui pembangunan infrastruktur di lahan-lahan pesantren yang masih ada. Kita ingin membeasiswa anak" biar hidup tumbuh berkembang dg ilmu yg setinggi-tingginya yg bisa mereka capai. Dengan dititipkan proses pendidikan yg dilaksanakan di pesantren. Kita cukup punya kemampuan APBD untuk







DeDuktif	Induktif
1. Ada Pesan Dakwah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan  2. Dalam Esakalasi Politik pada masyarakat yang religius dapat memasukkan nilai-nilai ajaran agama  3. Pesan yang bersifat religius dapat meningkatkan elektabilitas pemimpin	1. Khofifah Indar Parawansa sebagai ketua Umum Muslimat NU mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur  2. Konsentrasi kampanye Khofifah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan  3. Pengentasan kemiskinan tertuang dalam Nawa Bhakti Satya
<b>Konklusi</b> Pesan-pesan Dakwah yang ada dalam eskalasi politik pada masyarakat yang religius dapat meningkatkan elektabilitas calon pemimpin	<b>Generalisasi</b> Konsentrasi Khofifah Indar Parawansa dalam kampanye politik tertuju pada pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam Nawa Bhakti Satya

Tabel 4.1 Analisis Objek Penelitian

Premis 1: Pesan-pesan Dakwah yang ada dalam eskalasi politik pada masyarakat religius dapat meningkatkan elektabilitas calon pemimpin.

Premis 2: Konsentrasi Khofifah Indar Parawansa dalam kampanye politik tertuju pada pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam Nawa Bhakti Satya.

Proposisi: Tokoh yang memiliki banyak pengalaman dan mengetahui konklusi masyarakat kemudian mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan aktifitas kampanye selalu menyisipkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu dapat memenangkan kontestasi politik di daerah itu.

















